

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di beberapa daerah, keberadaan lembaga BUMDes belum begitu dikenal masyarakat, padahal BUMDes dibentuk untuk menopang perekonomian masyarakat tingkat desa. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa terkait dengan regulasi tentang BUMDes pun juga belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman modal ke BUMDes. Banyak diantara masyarakat lebih memilih melakukan peminjaman ke lembaga keuangan lainnya, sehingga potensi kinerja BUMDes di beberapa daerah belum terealisasi secara optimal.

Belum dikenalnya lembaga BUMDes di masyarakat serta keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi terkait regulasi tentang BUMDes menjadi problematika yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan lembaga BUMDes, seperti di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung misalnya, yang kebanyakan masyarakatnya tergolong masyarakat yang awam akan pengetahuan mengenai pembiayaan yang ada di BUMDesma. Akan tetapi, kategori calon anggota nasabah di daerah tersebut sangat banyak, hal ini dibuktikan mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani yang mempunyai lahan-lahan yang besar. Ketika petani akan melakukan cocok tanam maka mereka akan membutuhkan modal.

Kebutuhan akan modal tersebut sebenarnya dapat dipenuhi oleh lembaga BUMDesma melalui pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Akan tetapi, pengetahuan masyarakat tentang kedua jenis pembiayaan tersebut sangatlah minim. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 program PNPM mandiri sebagai induk pembiayaan SPP dan UEP telah dibubarkan. UPK sebagai pihak pengelola sudah tidak memiliki hak dan kewajiban mengelola dana tersebut, dari kejadian itu masyarakat mengira pembiayaan SPP dan UEP sudah tidak akan ada lagi.

Hal tersebut di atas, mengakibatkan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pemanfaatan BUMDesma mendasari amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 91 dan 92. Maka dari hal inilah seluruh pemerintah Desa Kecamatan Tanggunggunung melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk pembentukan BUMDesma yang bertujuan untuk melanjutkan pengelolaan dana dan pembiayaan SPP dan UEP. Lambat laun BUMDesma Tanggunggunung berkembang dengan sangat baik, hal ini terbukti BUMDesma Tanggunggunung memiliki aset produktif sebesar Rp 8.485.955.361 dari modal awal yang diluncurkan sebesar Rp 1.612.700,00 dan dengan jumlah profitabilitas/laba/surplus yang telah dicapai pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.083.485.191, tentunya hal ini dapat berjalan baik dikarenakan kinerja yang bagus serta produk pembiayaan mulai diminati

masyarakat. Perlu diketahui, bahwa kelompok peminjam yang ada di BUMDesma Tanggunggunung pada jenis pembiayaan SPP berjumlah 93 kelompok dan pada jenis pembiayaan UEP berjumlah 203 kelompok.²

Mayoritas masyarakat Tanggunggunung adalah bermata pencaharian petani, hal tersebut juga didukung dengan kondisi wilayah yang subur dan lahan yang cukup luas. Namun, dalam usahanya petani terkendala dengan hal permodalan, dalam kondisi seperti ini, masyarakat Tanggunggunung dapat dikatakan sebagai warga miskin produktif, yang berarti masyarakat yang memiliki usaha mikro yang modalnya belum cukup. Diharapkan, dengan adanya program pembiayaan UEP dan SPP masyarakatnya dapat berkurang beban terkait masalah permodalan.³

BUMDesma Tanggunggunung sangat penting bagi masyarakat, karena didalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) terdapat dua unit pembiayaan, yakni SPP dan UEP. Simpan Pinjam Perempuan atau yang lebih dikenal SPP ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses dan memiliki kontrol atas aset produktif. Hal ini merupakan salah satu wujud keberpihakan pada perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah perbuatan atau kegiatan di bidang ekonomi

² Laporan Pertanggungjawaban Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Tanggunggunung, (Tulungagung: BUMDesma Tanggunggunung, 2018) hal. 10-15

³ Guntur, *Pembangunan Ekonomi Rakyat: Transformasi perekonomian Rakyat Menuju Kemendarian dan Berkeadilan*, (Jakarta: Sagung seto, 2009) hal. 43

yang dilaksanakn oleh rumah tangga dan atau kelompok usaha ekonomi/ Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Koperasi Tani/ KUD untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Sedangkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal untuk pembelian bibit buat petani maupun usaha lainnya.⁴

Perlu diketahui bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terbanyak terdapat pada daerah pedesaan, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat dikategorikan masih rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa mengalami keterbatasan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Kejadian seperti ini juga dialami oleh masyarakat Tanggunggunung, usaha mereka merasa terhambat dikarenakan kekurangan modal yang tentunya berakibat terhadap penghasilan mereka yang sulit mengalami kenaikan.⁵ Maka dari itu pemerintah mendirikan suatu lembaga BUMDesma yang berfungsi melakukan pembiayaan terhadap masyarakat sehingga kendala keterbatasan modal dapat teratasi.

⁴ Dina Nurdiana, Dampak Signifikasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4 No. 02 Tahun 2016, hal. 296

⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama, 2010), hal. 93

BUMDesma Tanggunggunung sangat penting diteliti karena dalam BUMDesma tersebut terdapat pengaruh-pengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Tanggunggunung, serta membantu peningkatan pendapatan masyarakat desa setempat. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa masalah atau problem yang menjadi kendala dalam peran BUMDesma Tanggunggunung dalam menyejahterakan masyarakat.

Peneliti akan melakukan berbagai kegiatan penelitian yang nantinya dapat diketahui apakah BUMDesma Tanggunggunung telah berdiri sesuai dengan yang diharapkan, dapat membantu dan mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "**Peranan BUMDesma Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tanggunggunung**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan BUMDesma Tanggunggunung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi BUMDesma Tanggunggunung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung?
3. Solusi apa saja yang dilakukan BUMDesma Tanggunggunung dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peranan BUMDesma Tanggunggunung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung.
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi BUMDesma Tanggunggunung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung.
3. Untuk mendeskripsikan solusi apa saja yang dilakukan BUMDesma Tanggunggunung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah disini bertujuan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga hasil penelitian ini tidak membias dan dapat mencapai tujuan yang dicapai. Pembatasan masalah difokuskan pada peranan BUMDesma Tanggunggunung dapat membantu sektor ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan, bukan bersifat lebih kompleks seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program dari pihak kecamatan, karena dalam BUMDesma terdapat instansi Badan Kerja Sama Antar Desa yang didalamnya mengemban peran sosial terhadap masyarakat Tanggunggunung.

Dengan penelitian ini, penulis akan melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul yang dilakukan, yaitu “Peranan BUMDesma Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tanggunggunung”.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yang dapat dijadikan harapan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Peranan BUMDesma Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tanggunggunung melalui potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan BUMDesma Tanggunggunung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung.

2. Untuk syarat kelulusan jenjang Sarjana 1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN Tulungagung).

b. Bagi Akademisi

Semoga penelitian ini bisa menambah daftar keilmuan atau daftar pustaka bagi perpustakaan.

c. Bagi BUMDesma Tanggunggunung

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam BUMDesma agar dapat tepat guna bagi masyarakat Kecamatan Tanggunggunung.

d. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan referensi untuk dapat diambil manfaatnya bagi pembaca.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul “**Peranan BUMDesma Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tanggunggunung**”.

Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Peranan

Peranan secara sederhana dapat dinyatakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Sebagaimana yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁶ Makna peranan adalah upaya atau tindakan yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian kebijakan, yakni kejadian-kejadian yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

⁶ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hal. 19

maupun untuk menimbulkan akibat dampak yang secara nyata pada masyarakat.⁷

b. Kesejahteraan

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana didalamnya orang-orang atau masyarakat makmur.⁸ Sedangkan ekonomi kesejahteraan adalah studi normatif tentang bagaimana kita harus mengatur kegiatan ekonomi untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi penduduk. Bidang ekonomi ini, diantaranya topik-topik berfokus pada efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan.⁹

c. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam Peningkatan Asli Desa (PADes¹⁰).

2. Definisi Operasional

a. Peranan

⁷ Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 43

⁸ Tri Weda Rahardjo, *Strategi Pemasaran Dan Penguatan Daya Saing Produk Batik UMKM*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), hlm. 5

⁹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 292

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PR-RPDN), 2007), hal. 4

Peranan adalah kegiatan dimana satu pihak mendorong pihak lain untuk merubah suatu keadaan pihak yang didorong sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi ataupun keadaan individu atau kelompok yang merasakan aman, tentram dan nyaman. Dalam kondisi tersebut individu atau kelompok merasakan kepuasan atas dorongan dari pihak lain.

c. BUMDesma

BUMDesma adalah Badan Usaha Milik Bersama yang terdiri dari gabungan antara dua BUMDes atau lebih. Kebanyakan yang terjadi BUMDesma terbentuk dari gabungan BUMDes – BUMDes dalam satu wilayah kecamatan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang (a) latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) identifikasi dan pembatasan masalah, (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini memberikan pemahaman tentang kajian teori yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain, pada penelitian kualitatif ini peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Kajian pustaka ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dalam menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi, yaitu Peranan BUMDesma Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tanggunggunung.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti

melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hasil penelitian, memuat analisis peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teor-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan dari lapangan (*grounded theory*). Analisis data berisi kesimpulan sementara dari temuan penelitian. Untuk skripsi perlu dilengkapi dengan implikasi-implikasi dari temuan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari (a) kesimpulan, (b) implikasi penelitian (jika perlu), dan (c) saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan fokus penelitian.